

**AKIBAT HUKUM DARI PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP
PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA YANG
BERBEDA AGAMA DAN DI LANGSUNGKAN DI DALAM
WILAYAH INDONESIA (STUDI KASUS PENETAPAN No.
111/Pdt.P/2007/PN. BGR)**

TESIS

**Nama : Siti Harwati
NPM : 0806427921**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

**AKIBAT HUKUM DARI PENETAPAN PENGADILAN
TERHADAP PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA
INDONESIA YANG BERBEDA AGAMA DAN DI
LANGSUNGKAN DI DALAM WILAYAH INDONESIA (STUDI
KASUS PENETAPAN No. 111/Pdt.P/2007/PN. BGR)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan**

**Nama : Siti Harwati
NPM : 0806427921**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Siti Harwati

NPM : 0806427921

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Siti Harwati

NPM : 0806427921

Program Studi : Kenotariatan

Judul Tesis : AKIBAT HUKUM DARI PENETAPAN
PENGADILAN TERHADAP PERKAWINAN
ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA YANG
BERBEDA AGAMA DAN DI LANGSUNGKAN DI
DALAM WILAYAH INDONESIA (STUDI KASUS
PENETAPAN No. 111/Pdt.P/2007/PN. BGR)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI. (.....)

Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H, M.H. (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada Allah SWT atas segala kasih setiaNya dan anugerahNya yang telah diberikan setiap detikNya untuk dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Program Studi Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih sangat jauh dari sempurna, akan tetapi penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikannya. Tesis ini tidak mungkin dapat diselesaikan penulis sendiri tanpa bantuan, sumbangan ilmu pengetahuan dan pengalaman serta bimbingan yang diberikan kepada penulis juga dukungan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Maka dalam hal ini sudah sepantasnya apabila penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

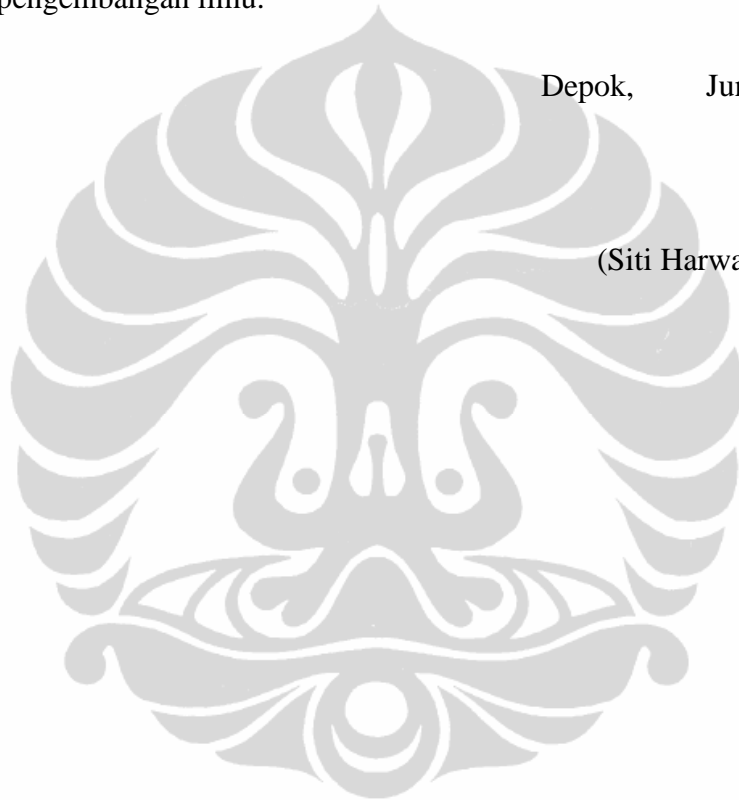
- (1) Ibu Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Kepada yang tersayang, Ibunda Sri Hartini dan Ayahanda Djaswadi yang telah banyak memberikan doa dan kasih sayang, semangat baik moril maupun materil serta dengan sabar menunggu untuk keberhasilan penulisan tesis ini;
- (3) Kepada yang tersayang Dian Setiawan yang selalu memberikan semangat, mendukung serta memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis dalam penulisan tesis ini;
- (4) Kepada sahabat-sahabat penulis Tania, Sonia, Caroline, lili, suci, andri, adit, iqbal, teuku, ery, haekal, novi dan keisyia yamima yang selalu memberikan semangat dan dukungan;

- (5) Kepada om dan tante serta sepupuku tersayang naomi, yang selalu memberikan dukungannya.
- (6) Kepada semua pihak yang telah membantu langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap ALLAH SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juni 2010

(Siti Harwati)



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Harwati
NPM : 0806427921
Program Studi : Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

AKIBAT HUKUM DARI PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERBEDA AGAMA DAN DI LANGSUNGKAN DI DALAM WILAYAH INDONESIA (STUDI KASUS PENETAPAN No. 111/Pdt.P/2007/PN. BGR)

Beserta perangkat perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : Juni 2010
Yang menyatakan,

(Siti Harwati)

ABSTRAK

Nama : Siti Harwati
 Program Studi : Kenotariatan
 Judul : AKIBAT HUKUM DARI PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERBEDA AGAMA DAN DILANGSUNGKAN DIDALAM WILAYAH INDONESIA (STUDI KASUS PENETAPAN No. 111/Pdt.P/2007/PN.BGR)

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam Undang-Undang yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bagaimana dengan perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Permasalahan yang akan diteliti adalah Apakah alasan para pihak dalam mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan perkawinan beda agama dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bogor pemberian izin perkawinan beda agama antara Tuan X dan Nona Y, dan Bagaimanakah kedudukan hukum mengenai perkawinan beda agama setelah adanya penetapan No. 111/Pdt.P/2007/PN. BGR. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian normatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data sekunder yang akan di gunakan terdiri dari Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder, yakni Bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan berupa buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang di langsungkan di indonesia, Bahan hukum tersier yang dalam penelitian ini dianggap perlu juga dipakai, misalnya: kamus-kamus yang di gunakan jika terdapat kesukaran-kesukaran dalam menterjemahkan sesuatu kalimat dalam penulisan penelitian ini. kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analitis data secara kualitatif sehingga hasil penelitiannya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum mengenai akibat hukum mengenai perkawinan beda agama yang di langsungkan di indonesia. Maka perkawinan berbeda Negara dapat dilaksanakan, selama mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini dapatlah dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara Tuan X yang memeluk agama Islam dengan Nona Y yang memeluk agama Katolik. Dengan melihat pasal 35 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006. Karena mereka telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor. Jadi dapat pula dikatakan bahwa keputusan hakim dapatlah dipertanggung jawabkan, dengan melihat dasar-dasar hukum yang dipakai oleh hakim. Dan keputusan hakim telah sesuai dengan dasar hukum yang ada saat ini. Sehingga perkawinan berbeda agama dapat dilaksanakan tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan haruslah terlebih dahulu memohon penetapan ke Pengadilan Negeri.

ABSTRACT

Name : Siti Harwati
Study Program : Notarial Affairs
Title : LEGAL CONSEQUENCES OF COURT'S ADJUDICATION
IN THE MARRIAGE OF INDONESIAN NATIONALS
WITH DIFFERENT RELIGIONS HELD IN THE
TERRITORY OF INDONESIA (CASE STUDY OF
ADJUDICATION No. 111/Pdt.P/2007/PN.BGR)

Marriage in Indonesia is stipulated by Law No 1 Of 1974 of Marriage. The Law defines marriage as material and conjugal bond between a man and a woman as a married couple intended to form a happy and everlasting family or household based on the One Supreme God. Therefore, the Law stipulates that marriage is lawful if held according to the same religion and faith and recorded according to the applicable law and legislation. But what if the marriage is held between a man and a woman with different religions. Official interpretation of Law of Marriage only acknowledges that a marriage is held based on the same religion and faith of a man and a woman intending to marry. In a pluralistic community like in Indonesia, a marriage between a man and a woman with the different religions can possibly occur. The problems to study are the reasons(s) of the parties in the filling of petition for District Court's adjudication to register the marriage with the different religions with the Municipal Office of Demography and Vital Statistics Bogor, the Consideration(s) of Judges of Bogor District Court to permit a marriage with the different religions after adjudication No. 111/Pdt.P/2007/PN.BGR. In this case, normative study and secondary data are used in this study. Secondary data used herein consists of binding Primary Legal Materials in the form of laws and legislation and collected Secondary Legal Materials in the form of books and articles relating to the marriage with the different religions held in Indonesia, tertiary Legal Materials considered necessary herein, for example: dictionaries in case of difficulties to translate a sentence in the writing of this study. They are further analyzed by using qualitative data analysis method to produce descriptive-analytic study results thereby giving a general description of legal consequences of marriage with the different religions held in Indonesia. A marriage with the different Nationality can be held if receiving Adjudication from District Court. In this case, a marriage between Mr. X embracing Islam and Ms. Y embracing Catholic with the different religions can be held by referring to article 35 of Law number 23 of 2006 because they have received adjudication from Bogor District Court. So, it can be said that the judge's decision can be accounted for by referring to legal bases used by the judge and the Judge's decision has complied with the current legal bases. Therefore, a marriage with the different religions can be held without waiving the existing provisions and by first petitioning for adjudication to District Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	7
1.3. Metode Penelitian	7
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II AKIBAT HUKUM DARI PENETAPAN PENGADILAN TERHADAP PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERBEDA AGAMA DAN DI LANGSUNGKAN DI DALAM WILAYAH INDONESIA	11
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	11
2.1.1. Perkawinan Menurut Undang-Undang	11
2.1.2. Tujuan Perkawinan	15
2.1.3. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan	15
2.2. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	19
2.2.1. Pengertian Perkawinan	19
2.2.2. Tujuan Perkawinan	22
2.2.3. Syarat-syarat dan Sahnya Perkawinan	23
2.2.4. Larangan Perkawinan	28
2.3. Perkawinan Hukum Agama Kristen	31
2.3.1. Hukum Agama Kristen Protestan	31
2.3.1.1. Pengertian Perkawinan	31
2.3.1.2. Tujuan Perkawinan	32
2.3.1.3. Syarat dan Sahnya Perkawinan	32
2.3.1.4. Larangan Perkawinan	33
2.3.2. Hukum Agama Kristen Katolik	34
2.3.2.1. Pengertian Perkawinan	34
2.3.2.2. Tujuan Perkawinan	35
2.3.2.3. Syarat dan Sahnya Perkawinan	35

	2.3.2.4. Larangan Perkawinan	37
2.4.	Perkawinan Beda Agama dari Sudut Pandang Agama	38
2.4.1.	Perkawinan Beda Agama dari Sudut Pandang Agama Islam	38
2.4.2.	Perkawinan Beda Agama dari Sudut Pandang Agama Kristen Katolik	43
2.4.3.	Perkawinan Beda Agama dari Sudut Pandang Agama Kristen Protestan	45
BAB III	Analisis Mengenai Perkawinan Beda Agama Yang Diberikan Penetapan Oleh Hakim dan Didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil Bagi Warga Negara Indonesia	48
3.1.	Kasus posisi	48
3.2.	Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan oleh Hakim di Wilayah Indonesia	52
3.3.	Analisa Kasus	55
BAB IV	PENUTUP	63
4.1.	Kesimpulan	63
4.2.	Saran	67
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN	